



Available at :

<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika>

EkoNika
Jurnal Ekonomi Universitas Kediri

Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur

Lisa Agustin¹, Hadi Sumarsono²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang

email: lisa.agustin.1804326@students.um.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan bantuan sosial terhadap kemiskinan di 38 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sampai 2020. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data time series yang digunakan yaitu tahun 2018 sampai 2020 dan data cross section yang digunakan yaitu 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Model yang terpilih dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengangguran dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, sedangkan bantuan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the unemployment rate, human development index, and social assistance on poverty in 38 Regencies/Cities of East Java Province in 2018 to 2020. The data analysis used in this research is panel data. The data time series used are from 2018 to 2020 and the data cross section used are 38 regencies/cities in East Java Province. The model chosen in this study is the Fixed Effect Model (FEM). In this study it was found that unemployment and HDI had an effect on poverty in East Java Province, while social assistance had no effect on poverty in East Java Province.

INTRODUCTION

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang menjadi isu global dimana pengurangan kemiskinan terdapat dalam poin pertama di 17 tujuan SDGs. *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu suatu rencana yang berkaitan dengan melakukan aksi global yang telah disepakati oleh pemimpin-pemimpin dunia dengan tujuan untuk menuntaskan tingkat kemiskinan dan menjaga planet bumi dengan target capaian yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 (UNDP, 2017). Dalam urusan pemerintahan demokratis ketika melakukan negosiasi internal isu permasalahan sosial yang menjadi fokus utama pembahasan adalah ketimpangan pendapatan, perubahan iklim, kemiskinan, dan upah minimum (Drabek, 2021). Keterlambatan

pembangunan ekonomi di sebuah negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi permasalahan penting bagi suatu wilayah salah satunya adalah tingginya tingkat kemiskinan. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga permasalahan kemiskinan harus diselesaikan agar tujuan pembangunan dapat tercapai (Puspita, 2015).

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang yang juga menghadapi permasalahan pembangunan ekonomi berupa tingginya angka kemiskinan (Purnomo, 2019). Berdasarkan data yang dirilis BPS (2020b) jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 27.549,69 jiwa dimana jumlah tersebut meningkat sebanyak 2.763,82 jiwa penduduk miskin daripada tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 24.785,87 jiwa. Beberapa penyebab yang dapat mempengaruhi peningkatan angka penduduk miskin antara lain tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah, rendahnya jumlah lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan yang rendah. Tingkat kemiskinan di Indonesia dapat berkurang dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat maka semakin rendah tingkat kemiskinan, maka dari itu tingkat kesejahteraan dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif. (Bintang & Woyanti, 2018).

Provinsi Jawa Timur termasuk dalam sebuah wilayah yang berada di Pulau Jawa dengan jumlah populasi terpadat ke-dua setelah Jawa Barat. Penduduk Jawa Timur tahun 2018 sebanyak 39.521,9 ribu jiwa (BPS, 2018a). Terkait bahasan mengenai kondisi kemiskinan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pada tahun 2018. Bulan Maret 2018 kuantitas penduduk miskin yang ada di wilayah Jawa Timur sebanyak 4.332,59 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2018 sebanyak 4.292,15 ribu jiwa. Dari perbandingan jumlah penduduk miskin antara bulan Maret dan bulan September 2018 terjadi penurunan jumlah kemiskinan sebanyak 40,44 ribu jiwa (BPS, 2018b). Terdapat pola yang timpang pada beberapa jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Erlando, Haryanto, & Rositawati, 2020).

Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kenaikan maupun penurunan tingkat penduduk miskin di Jawa Timur adalah pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan bantuan sosial. Hubungan yang ada diantara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan saling memiliki keterkaitan mengenai kesejahteraan. Masyarakat

yang tidak memiliki pekerjaan berada dalam kelompok masyarakat miskin, hal itu terjadi karena tidak adanya pendapatan yang didapat sehingga kegiatan konsumsi masyarakat rendah (Puspita, 2015). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan sebuah standar yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur bagaimana hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah dapat diakses oleh penduduk di wilayah tersebut, pengukuran tersebut mencakup tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak (Ningrum, 2017). IPM juga berguna untuk mengklasifikan suatu negara sebagai kategori negara maju, berkembang, atau terbelakang. Bantuan sosial merupakan program yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta membantu masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan untuk bertahan hidup. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu bentuk program pemerintah yang diberlakukan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan yang juga bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari agar mendapatkan kondisi hidup layak (Faulana, Murniawaty, & Rusdarti, 2021).

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sehingga mendorong untuk dilakukan kajian lebih jauh mengenai kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Program serta kebijakan apa saja yang dapat diterapkan dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu perlu mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan. Sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih fokus terhadap faktor penyebab permasalahan kemiskinan. Tujuan dilakukannya riset ini adalah untuk melihat dan memahami bagaimana dampak tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan bantuan sosial terhadap kondisi kemiskinan di 38 Kab/Kota se-Jawa Timur pada tahun 2018 sampai 2020. Dengan mencapai tujuan tersebut diharapkan dapat mengetahui faktor yang memilikipengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan tingkat kemiskinan yang nantinya dapat digunakan sebagai gambaran dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

LITERATURE REVIEW

Kemiskinan

Suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari sebagai tindakan untuk bertahan hidup berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal merupakan suatu kondisi yang disebut kemiskinan (Todaro, 2009). Ketidakmampuan tersebut terjadi karena tidak adanya pemasukan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat istilah yang dinamakan lingkaran setan kemiskinan yaitu suatu siklus yang saling berhubungan menjadi penyebab kemiskinan terus terjadi. Ketika produktivitas rendah maka pendapatan yang dihasilkan juga menurun sehingga tingkat konsumsi, tabungan, dan investasi juga rendah. Rendahnya tingkat investasi akan menyebabkan kondisi kekurangan modal sehingga kegiatan produksi akan terganggu dan hal tersebut akan terjadi berulang membentuk siklus kemiskinan (Purnomo, 2019). Secara teoritis langkah yang dapat digunakan untuk memutus lingkaran kemiskinan adalah dengan investasi atau memberikan modal dengan tujuan untuk meningkatkan terbentuknya lapangan pekerjaan baru yang secara bertahap dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Ibnu Abbas & Farida Rahmawati, 2020).

Menurut BPS (2020c), kemiskinan diukur melalui kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengukuran dengan pendekatan moneter menjelaskan bahwa kemiskinan dianggap sebagai kekurangan individu dalam mencapai tingkat konsumsi minimum yang diukur berdasarkan garis kemiskinan (Kharisma, Remi, Wardhana, & Minarso, 2020). Total hasil perhitungan antara nilai garis kemiskinan makanan dengan nilai garis kemiskinan non-makanan dihitung sebagai nilai garis kemiskinan, dimana penduduk dikategorikan sebagai masyarakat miskin ketika berada dalam kondisi dengan rata-rata pengeluaran bulanan per kepala di bawah nilai garis kemiskinan yang telah ditentukan. Pada tahun 2021, besaran nilai garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp 472.525/kapita/bulan dengan pembagian besaran nilai garis kemiskinan berupa makanan sebesar Rp 349.474 dan garis kemiskinan non-makanan sebesar Rp 123.051 (BPS, 2021). Nilai yang ditetapkan merupakan nilai minimum pendapatan yang harus diperoleh masyarakat agar mendapatkan standar hidup layak (Katadata, 2018).

Kemiskinan harus dapat dituntaskan karena permasalahan kemiskinan merupakan faktor penghambat pembangunan. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun wilayah telah melakukan berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan mulai dari kebijakan hingga pemberlakuan program pengentasan kemiskinan. Namun, berjalannya program serta kebijakan yang diberlakukan masih belum terkoordinasi dengan baik sehingga tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan belum terealisasi dengan baik (Kharisma et al., 2020). Agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat terwujud perlu adanya kerjasama berbagai pihak dalam membuat kebijakan. Selain koordinasi yang belum optimal terdapat faktor-faktor lain yang menghambat menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya wilayah Jawa Timur. Menurut Puspita (2015) perbedaan geografis, jumlah penduduk, tingkat pendapatan, faktor sejarah, dan adanya kualitas SDA dan SDM yang berbeda merupakan beberapa faktor penyebab tingkat kemiskinan di negara berkembang.

Pengangguran

Pengangguran dapat menjadi faktor penghambat pembangunan ekonomi di suatu negara. Hal tersebut terjadi jika jumlah penduduk yang tinggi serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang mencukupi dapat berpotensi untuk menurunkan produktivitas masyarakat yang berada dalam kategori angkatan kerja (Puspita, 2015). Penduduk dengan usia diatas 15 tahun yang sedang melakukan pekerjaan atau tidak melakukan pekerjaan (menganggur) merupakan masyarakat yang berada dalam kelompok angkatan kerja (BPS, 2011). Masyarakat yang memiliki kegiatan produktif seperti melakukan pekerjaan akan memiliki pemasukan yang berdampak pada terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, maka dari itu pengangguran dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dari sisi pendapatan (Hatta & Khoirudin, 2020). Pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kemiskinan (Purnomo, 2019). Ketika angka pengangguran menurun maka dapat menurunkan angka kemiskinan. Dengan berkurangnya angka pengangguran dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu negara.

Menurut Mankiw (2007), berdasarkan penyebab timbulnya pengangguran terdapat empat jenis yaitu pengangguran friksional, struktural, siklikal, dan teknologi.

Pengangguran friksional terjadi karena seseorang yang membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur pasar tenaga kerja, dimana suatu kondisi yang terjadi terdapat ketidaksesuaian antara *supply* dan *demand* pada tenaga kerja. Pengangguran siklikal disebabkan oleh kondisi perekonomian suatu negara yang fluktuatif, ketika tingkat perekonomian menurun akan menurunkan daya beli sehingga perusahaan akan mengurangi kegiatan produksi. Akibat dari pengurangan kegiatan produksi yaitu akan terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja. Pengangguran teknologi terjadi karena tenaga kerja yang tergantikan oleh berkembangnya teknologi modern, dimana dengan menggunakan teknologi biaya produksi dapat lebih berkurang dan keuntungan yang diperoleh perusahaan akan semakin meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia

Standar yang digunakan sebagai patokan capaian suatu daerah dalam pelaksanaan pembangunan manusia disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Syofya, 2018). Dalam melihat ukuran capaian dalam pembangunan manusia yang diberlakukan terdapat tiga indikator yang digunakan, yaitu pertama indikator kesehatan diukur dengan lama harapan hidup di suatu wilayah, indikator kedua berupa pendidikan yang dinilai berdasarkan dari rata-rata lama waktu sekolah dan angka melek huruf, dan indikator ketiga ekonomi yang diukur dari kemampuan masyarakat dalam memperoleh barang yang diinginkan (daya beli) (Sumarsono & Novarinda, 2016). IPM dapat menjelaskan keberhasilan penduduk yang tinggal di suatu wilayah dalam memperoleh hasil pembangunan manusia untuk kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (BPS, 2020a). Dari indikator pengukuran capaian pembangunan tersebut dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan harus dapat lebih mudah diakses oleh golongan masyarakat miskin agar dapat mencapai standar hidup layak yang telah ditentukan. Dengan kemudahan akses fasilitas-fasilitas tersebut masyarakat dapat meningkatkan kualitas kesehatan berupa kesehatan fisik dan mental serta pendidikan berupa peningkatan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat lebih produktif dalam bekerja.

IPM memiliki manfaat lain selain menjadi indikator yang dipergunakan untuk mengukur seberapa sukses pembangunan suatu negara dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, IPM memiliki manfaat sebagai data strategis dalam

menentukan tingkat pembangunan suatu daerah dan mengukur kinerja pemerintah (BPS, 2020a). Pembangunan manusia merupakan proses untuk berkembang, memiliki hidup sehat, dan berpendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup layak (Hatta & Khoirudin, 2020). IPM menunjukkan hubungan yang berpengaruh signifikan negatif terhadap angka kemiskinan (Andykha, Handayani, & Woyanti, 2018). Ketika nilai tingkat IPM yang tinggi menunjukkan masyarakat memiliki kondisi kesehatan, pendidikan, kehidupan yang memadai sehingga mampu berinovasi dan berdaya saing. Dengan kondisi tersebut akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan berpengaruh terhadap menurunnya angka kemiskinan (Purnomo, 2019).

Bantuan Sosial

Berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2017 bantuan sosial ialah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, masyarakat kurang mampu, ataupun masyarakat rentan terhadap resiko sosial, dimana bantuan yang diberikan berupa uang, barang, ataupun jasa dimana bantuan sosial ini merupakan program yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (JDIH, 2017). Salah satu program bantuan sosial bersyarat adopsi dari pelaksanaan *conditional cash transfer* adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (Habibullah et al., 2017). Bantuan PKH memiliki syarat dimana keluarga penerima manfaat hanya diberikan bantuan, jika sedang menyekolahkan anak di tingkat SMP serta seorang ibu dalam kondisi mengandung serta memberi ASI anaknya yang secara rutin pergi mengunjungi lokasi pelayanan kesehatan. Tujuan dari diberlakukannya program ini adalah meningkatkan taraf hidup kesejahteraan keluarga dalam hal akses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan peningkatan jaminan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Program keluarga harapan diberikan dalam bentuk tunjangan berupa uang, barang, atau layanan sosial yang diberikan kepada keluarga berpenghasilan rendah (Gultom, Kindangen, & Kawung, 2020). Selain Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah saat ini memberlakukan program bantuan sosial lain agar dapat membantu masyarakat dalam berbagai aspek seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam aspek pendidikan, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JamKesMas) dalam aspek kesehatan, dan bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) untuk membantu meringankan kebutuhan pokok sehari-hari.

Bantuan sosial juga merupakan program jaminan perlindungan yang bertujuan untuk meminimalkan kerentanan ekonomi rumah tangga miskin. Tujuan jangka pendek dari program bantuan sosial adalah untuk membantu meringankan tanggungan pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin, sementara itu tujuan jangka panjang diberlakukan program bantuan sosial agar dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan (Habibullah et al., 2017). Variabel bantuan sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan (Lindiasari S & Ramadhani, 2019). Hasil riset yang diberikan memiliki perbedaan hasil dengan riset yang dilakukan oleh Ridha et al., (2021) dimana riset ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan program bantuan sosial tidak mempunyai hubungan yang berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian terkait permasalahan tingkat kemiskinan yang dihadapi. Hal tersebut dapat terjadi karena berdasarkan pengamatan di lapangan banyak keluarga penerima manfaat yang belum memanfaatkan secara optimal bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya (Gultom et al., 2020). Proses penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial memerlukan pendekatan melalui pendataan peserta yang valid dengan melihat kondisi terbaru agar penerima bantuan sosial benar-benar layak mendapatkan dan tujuan dari program tersebut dapat terwujud (Faulana et al., 2021).

METHODS

Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan kuantitatif, dimana bahan riset yang didapat berupa angka yang diolah menggunakan alat statistik. Jenis data yang diterapkan dalam riset ini ialah jenis data sekunder, dimana informasi yang didapatkan berbentuk data numerik, dan analisisnya menggunakan statistik berdasarkan data yang ditemukan berdasarkan dari sumber yang ada. Teknik dalam mengumpulkan informasi yang dilakukan dalam riset ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian mencatat informasi berupa data yang diperoleh, dan mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan riset ini untuk mendapatkan hasil penelitian. Sumber data yang dikumpulkan pada riset ini bersumber berdasarkan dari instansi yang berkaitan dengan pembahasan serta

permasalahan yang ada pada penelitian, yaitu lembaga pemerintah Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data yang diperoleh berupa file berbentuk excel dan dokumen berbentuk PDF Jawa Timur Dalam Angka di tahun 2019-2021. Metode analisis pengolahan data yang digunakan untuk melakukan analisis pada riset ini adalah analisis regresi data panel terdiri dari kombinasi data deret waktu (*time series*) dan data potong lintang (*cross section*). Metode analisis data yang dilakukan untuk menganalisa hasil pengolahan data berupa analisis deskriptif, dimana analisis deskriptif merupakan interpretasi dari hasil yang diberikan oleh pengolahan data kuantitatif. Alat statistik pada penelitian ini adalah aplikasi E-Views dimana dalam pengolahan data dengan melakukan regresi data panel untuk menentukan hasil analisis dalam memilih model yang terbaik serta uji yang harus lolos agar penelitian yang dilakukan dapat dikatakan valid.

Model Regresi Data Panel

Lokasi riset yang dilakukan berada di 38 wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2020. Penggunaan variabel terikat (Y) yang diterapkan dalam riset ini adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel bebas (X) yang diterapkan adalah pengangguran, IPM, dan bantuan sosial. Data kemiskinan yang digunakan yaitu persentase penduduk miskin. Data pengangguran memakai data pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data IPM menggunakan nilai indeks pembangunan manusia. Data bantuan sosial menggunakan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data yang didapat dianalisis menggunakan regresi data panel. Oleh karena itu, bentuk model dari persamaan yang dapat dibentuk sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_{TPT} TPT_{it} + \beta_{IPM} IPM_{it} + \beta_{KPM} KPM_{it} + \mu_{it}$$

Dimana:

Y = Tingkat Kemiskinan

α = Constanta

β_{TPT} = Koefisien Regresi Pada Variabel Pengangguran

β_{IPM} = Koefisien Regresi Pada Variabel IPM

β_{KPM} = Koefisien Regresi Pada Variabel Bantuan Sosial

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

IPM= Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

KPM = Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

μ = error atau variabel di luar model

i = Cross Section (38 Kab/Kota)

t = Time Series (Tahun 2018-2020)

Model Dan Uji Dalam Regresi Data Panel

Perhitungan yang dilakukan pada pengolahan data regresi data panel, terdapat pengujian ekonometrik serta uji statistik yang harus dilakukan. Model *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) merupakan tiga model yang dapat diterapkan untuk memilih model terbaik dalam perhitungan regresi data panel, pemilihan model terbaik yang dilakukan berguna untuk menganalisis hasil yang diberikan dari regresi data panel. Setelah melakukan perhitungan untuk memilih model terbaik, model yang terpilih pada riset ini adalah FEM dengan menggunakan dua jenis uji statistik yaitu menguji antara CEM dan FEM yang disebut uji chow serta menguji antara FEM dan REM yang disebut uji hausman. Dummy wilayah pada model penelitian yang digunakan ini memiliki tujuan ketika ingin melihat bagaimana variasi dari karakteristik serta variasi pada perkembangan yang ada di variabel dependen atau dikenal dengan *Least Square Dummy Variable* (LSDV) (Bintang & Woyanti, 2018). Bentuk model pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempertimbangkan model FEM adalah pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS), dimana model yang mengusahakan untuk mengurangi penyimpangan yang ada pada hasil dari perhitungan (regresi) terhadap keadaan sebenarnya (Andykha et al., 2018).

Pada pendekatan OLS uji asumsi klasik, terdapat dua jenis pengujian yang wajib terpenuhi, yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Multikolinearitas mengacu pada adanya suatu hubungan yang terjadi di beberapa atau seluruh variabel independen pada model regresi yang, dimana terdapat hubungan linear sempurna atau pasti (Andykha et al., 2018). Ketika hasil uji yang dilihat menggunakan *correlation matrix* tersebut mempunyai hasil perhitungan yang lebih tinggi dari 0,8 maka dapat dikatakan pada model terdapat gejala multikolinearitas. Kondisi heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi dimana tidak terwujudnya asumsi homoskedastisitas (Andykha et al., 2018). Dengan melakukan uji

glejser hasil uji heteroskedastisitas dapat dikatakan lolos jika hasil yang diberikan oleh probabilitas dapat lebih tinggi dari nilai α sebesar 0,05.

Pengujian secara statistik yang terdapat pada penelitian ini yaitu uji koefisien determinasi, uji signifikansi secara simultan, dan uji signifikansi secara parsial. Koefisien determinasi merupakan besarnya nilai kontribusi variabel independen terhadap variabel dependennya. Besaran nilai R-squared yang semakin tinggi atau mendekati 1, menjelaskan bahwa semakin tinggi pula kemampuan suatu variabel independen (X) dalam menunjukkan sebuah variasi perubahan pada variabel dependennya (Y). Uji signifikan simultan dapat digunakan ketika ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel X yang terdapat pada model secara bersama-sama terhadap perubahan variabel Y. Sedangkan uji signifikan parsial digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel X terhadap perubahan variabel Y.

RESULTS

Penentuan Model Estimasi

Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel menggunakan aplikasi EViews perlu diketahui terlebih dahulu hasil dari masing-masing model yaitu CEM, FEM, dan REM. Setelah mendapatkan hasil maka dapat dilakukan uji yang diperlukan dalam memilih model yang terbaik untuk dilakukan analisis. Berikut adalah uji yang dilakukan:

1. Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Cross-section F	0.0000
Cross-section Chi-Square	0.0000

Sumber: data diolah dengan *EViews* 11

Pengujian yang digunakan untuk menguji antara model CEM dan FEM sebagai model yang terbaik dapat dilakukan menggunakan uji chow. Jika hasil yang diberikan menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima maka model yang terpilih adalah FEM. Sebaliknya jika hasil yang diberikan menunjukkan H_0 diterima dan H_1 ditolak maka model yang terpilih adalah CEM. Besaran nilai probabilitas yang diberikan pada uji chow menyajikan bahwa nilai pada cross

section $F(0.00) < \alpha(0.05)$ dan nilai pada cross section chi-square $(0.0000) < \alpha(0.05)$ maka model FEM adalah model yang terpilih pada uji chow.

2. Uji Hausman

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Cross-section random	0.0060
----------------------	--------

Sumber: data diolah dengan *EViews* 11

Pengujian yang digunakan untuk menguji antara model FEM dan REM sebagai model terbaik dinamakan uji hausman. Jika hasil yang diberikan menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima maka model yang terpilih adalah FEM. Sebaliknya jika hasil yang diberikan menunjukkan H_0 diterima dan H_1 ditolak maka model yang terpilih adalah REM. Hasil yang diberikan dari uji hasuman menyajikan bahwa besaran nilai probabilitas pada cross section random $(0.0060) < \alpha(0.05)$ maka model terbaik yang terpilih pada uji hausman adalah model FEM.

Pengujian Asumsi Dan Kesesuaian Model

Berdasarkan hasil yang diberikan dapat diketahui bahwa model yang terpilih adalah model *Fixed Effect Model* (FEM). Model FEM memprediksi adanya sebuah perbedaan yang terjadi antara individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepanya, teknik yang digunakan untuk mengestimasi model FEM adalah *variable dummy*. Berikut merupakan hasil dari perhitungan menggunakan model FEM pada analisis regresi data panel:

Gambar 1. Hasil Analisis Regresi Data Panel

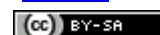
Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/21/21 Time: 19:41
 Sample: 2018 2020
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.45854	7.790225	3.524743	0.0007
PENGANGGURAN	0.215356	0.034802	6.187999	0.0000
IPM	-0.247575	0.109640	-2.258071	0.0269
BANSOS	2.63E-07	1.83E-07	1.436817	0.1550

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.296471	R-squared	0.995442
Mean dependent var	10.72798	Adjusted R-squared	0.992945
S.D. dependent var	4.410867	S.E. of regression	0.370487
Akaike info criterion	1.125564	Sum squared resid	10.02004
Schwarz criterion	2.109636	Log likelihood	-23.15716
Hannan-Quinn criter.	1.524944	F-statistic	398.5986
Durbin-Watson stat	3.085423	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: data diolah dengan *EViews* 11



Dengan terpilihnya model FEM sebagai model paling baik, dapat diketahui model pendekatan yang digunakan yaitu model OLS. Uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas merupakan dua jenis pengujian asumsi klasik yang harus terpenuhi pada model pendekatan OLS yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya permasalahan pada analisis data panel. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas:

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	Pengangguran	IPM	Bantuan Sosial
Pengangguran	1.000000	0.485843	-0.140188
IPM	0.485843	1.000000	-0.317199
Bantuan Sosial	-0.140188	-0.317199	1.000000

Sumber: data diolah dengan *EViews 11*

Uji multikolinearitas dapat digunakan ketika ingin menetapkan dan melihat mengenai ada tidaknya sebuah hubungan pada dua atau lebih variabel yang saling berhubungan dalam suatu model (Purnomo, 2019). Nilai korelasi antara variabel independen yang menunjukkan nilai di dibawah 0,8 berarti tidak adanya multikolinearitas dalam penelitian. Nilai korelasi antara pengangguran dan IPM senilai 0,485843, nilai korelasi antara pengangguran dengan bantuan sosial senilai -0,140188, dan nilai korelasi antara IPM dengan bantuan sosial senilai -0,317199. Pada hasil perhitungan analisis regresi data panel menunjukkan nilai korelasi keseluruhan antar variabel berada dibawah 0,8 yang berarti analisis regresi data panel yang dilakukan terbebas dari masalah multikolinearitas menggunakan perhitungan *correlation matrix*.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Prob
Pengangguran	0.7014
IPM	0.8485
Bantuan Sosial	0.4978

Sumber: data diolah dengan *EViews 11*

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan ketika ingin melihat dan menentukan ketika dalam sebuah model yang terbentuk terjadi sebuah perbedaan varians dari residual (Purnomo, 2019). Ketika menggunakan perhitungan uji glejser, dikatakan hasil yang diberikan pada uji asumsi klasik tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai probabilitas lebih tinggi dari α sebesar 0,05. Pada variabel pengangguran nilai prob (0,7014) > α (0,05). Pada variabel IPM nilai prob (0,8485) > α (0,05). Pada variabel bantuan sosial nilai prob (0,4978) > α (0,05). Nilai probabilitas pada masing-masing variabel menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari nilai α (0,05), sehingga dalam penggunaan uji glejser dapat disimpulkan tidak adanya suatu permasalahan heteroskedastisitas pada hasil regresi data panel.

Interpretasi Model Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil metode pengolahan data pada perhitungan analisis regresi data panel yang telah dilakukan dapat membentuk model persamaan, sebagai berikut:

$$Y_{it} = 27,45854 + 0,215356 \text{ TPT}_{it} + (- 0,247575) \text{ IPM}_{it} + 2,61 \text{ KPM}_{it} + \mu_{it}$$

1. Nilai Koefisien

Tabel 5. Hasil Nilai Koefisien

Variable	Coefficient
C	27.45854
Pengangguran	0.215356
IPM	-0.247575
Bantuan Sosial	2.63E-07

Sumber: data diolah dengan *EViews 11*

Besaran nilai konstanta sebesar 27,45 menandakan bahwa ketika variabel independen sama dengan nol maka nilai tingkat kemiskinan sejumlah 27,45.

Nilai koefisien yang dapat dilihat pada variabel pengangguran sejumlah 0,21 menandakan ketika pengangguran yang direpresentasikan oleh TPT meningkat sebesar 1 persen maka hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kemiskinan sejumlah 0,21.

Nilai koefisien yang dapat dilihat pada variabel IPM sebesar $-0,24$ menandakan ketika besaran nilai IPM meningkat sejumlah 1 persen maka hal tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan sejumlah $0,24$.

Nilai koefisien yang dapat dilihat pada variabel bantuan sosial sebesar $2,61$ menandakan ketika tingkat bantuan sosial meningkat sejumlah 1 persen maka hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kemiskinan sejumlah $2,61$.

2. Nilai Prob (F-statistic)

Tabel 6. Nilai P-value

Prob (F-statistic)	0.000000
--------------------	----------

Sumber: data diolah dengan *EViews 11*

Hasil yang ditemukan berdasarkan analisis uji statistik nilai dari uji probabilitas (f-statistic) sebesar $0,000000$, dimana $p\text{-value} (0,000000) < \alpha (0,05)$ sehingga hasil yang diberikan menandakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima berdasarkan nilai dari $p\text{-value} < \alpha$. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada taraf signifikan 5% model yang terbentuk dapat dikatakan baik.

3. Koefisien Determinasi (R-square)

Tabel 7. Nilai Koefisien Determinasi

R-squared	0.995442
-----------	----------

Sumber: data diolah dengan *EViews 11*

Besaran nilai dari koefisien determinasi yang didapat menunjukkan bahwa R-square sebesar $0,995442$ yang memiliki arti bahwa model yang telah terbentuk dapat menjelaskan variabel dependennya yaitu kemiskinan di 38 Kab/Kota se-Jawa Timur tahun 2018-2020 sebesar 99% dan sisa penjelasan lainnya dapat diberikan oleh variabel lain diluar model sebesar 1% . Nilai R-square digunakan ketika penelitian menggunakan data populasi. Adj R-square yang sebesar $0,992945$ merupakan penyesuaian dari R-squared yang didasarkan atas banyaknya observasi dan juga banyaknya variabel ketika menggunakan data sampel.

4. Uji Pengaruh Secara Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji F

F-statistic	398.5986
-------------	----------

Sumber: data diolah dengan *EViews 11*

Hasil yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian pada uji F dapat ditemukan bahwa nilai dari F-statistik yang telah diketahui sebesar 398,5986 dengan nilai F-tabel sebesar 2,69. Menurut perhitungan yang diperoleh, hasil nilai F-statistik ($398,5986 > F\text{-tabel } (2,69)$) pada taraf signifikan sebesar 5%. Dimana secara simultan terdapat hubungan yang berpengaruh diantara variabel independen dengan variabel dependen.

5. Uji Pengaruh Secara Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	t-statistic	Prob
C	27.45854	3.524743	0.0007
Pengangguran	0.215356	6.187999	0.0000
IPM	-0.247575	-2.258071	0.0269
Bantuan Sosial	2.63E-07	1.436817	0.1550

Sumber: data diolah dengan *EViews 11*

Dapat diketahui nilai t-tabel sebesar 1,65882. Apabila dibandingkan dengan nilai t-statistik pada variabel pengangguran yaitu sebesar 6,187999 maka diperoleh nilai t-statistik ($6,187999 > t\text{-tabel } (1,65882)$). Nilai probabilitas ($0,0000 < \alpha (0,05)$). Nilai koefisien yang positif yaitu sebesar 0,215356. Hasil yang diberikan menunjukkan bahwa pengangguran mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

Nilai t-statistik pada variabel IPM sebesar -2,258071 maka diperoleh nilai t-statistik ($2,258071 > t\text{-tabel } (1,65882)$). Nilai probabilitas ($0,0259 < \alpha (0,05)$). Nilai koefisien yang negatif yaitu sebesar -0,247575. Maka dari hasil yang diberikan mengindikasikan bahwa pada variabel IPM terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Nilai t-statistik pada variabel bantuan sosial sebesar 1,436817 maka diperoleh nilai t-statistik ($1,436817 < t\text{-tabel } (1,65882)$). Nilai probabilitas ($0,1550 > \alpha (0,05)$). Nilai koefisien yang positif yaitu sebesar 2,63. Maka dari hasil yang diberikan mengindikasikan bahwa pada variabel bantuan sosial tidak terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

Interpretasi Hasil Analisis

1. Pengangguran Terhadap kemiskinan

Variabel pengangguran yang direpresentasikan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menunjukkan hasil analisis regresi pada variabel pengangguran mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hasil dilakukannya riset ini memiliki hasil yang serupa dengan penelitian Bintang & Woyanti (2018), dimana menyatakan pengangguran terdapat hubungan yang berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kondisi jumlah pengangguran yang terus meningkat dapat meningkatkan angka kemiskinan di wilayah Jawa Timur. Terdapat penyebab yang dapat mempengaruhi kenaikan tingkat pengangguran yang berakibat pada tingginya angka kemiskinan. Kondisi tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja, serta SDM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran (Puspita, 2015). Dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru masyarakat dapat mengembangkan keterampilan bakat dan minat yang dimiliki sehingga ada peluang untuk dapat mengambil lebih banyak tenaga kerja yang akan berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat pengangguran.

Seseorang yang berada dalam kondisi menganggur akan menurunkan tingkat produktivitasnya sehingga tidak ada pendapatan yang masuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Arsyad (1997) dalam Hatta & Khoirudin (2020) pengangguran dan kemiskinan saling terkait satu sama lain, karena kondisi seseorang yang menganggur akan menurunkan tingkat kesejahteraannya. Kemiskinan juga merupakan salah satu efek jangka panjang dari adanya permasalahan pengangguran yang terus menerus terjadi. Sehingga menurut Sukirno (2012) dalam Bintang & Woyanti (2018) pengangguran tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme pasar dan memerlukan campur tangan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan pengangguran di tingkat nasional maupun daerah.

2. Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Hasil yang diberikan pada regresi data panel menandakan bahwa pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian yang dilakukan ini

mempunyai hasil yang sama berdasarkan riset yang dilakukan oleh Hatta & Khoirudin (2020) dimana IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Besaran nilai IPM yang tinggi dapat menunjukkan kualitas sumberdaya manusia yang baik sehingga dapat mengurangi tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, besaran nilai IPM di suatu wilayah menandakan sasaran yang dapat tercapai berdasarkan 3 dimensi dalam pembangunan manusia (Syofya, 2018). Berdasarkan *United Nation Development Poverty Index* (UNDP) IPM dinilai berdasarkan 3 dimensi yaitu kesehatan yang dilihat berdasarkan nilai rata-rata lama harapan hidup, pendidikan yang dilihat melalui nilai rata-rata lama waktu sekolah dan angka melek huruf, serta standar dalam memperoleh hidup layak yang dilihat melalui pendapatan yang diperoleh (Firmani & Aif, 2021).

IPM di Indonesia identik sebagai upaya dalam pengurangan angka kemiskinan karena dengan melakukan investasi pada bidang kesehatan serta pendidikan dapat lebih berpengaruh terhadap penduduk miskin yang mengandalkan tenaga kasar sebagai aset yang dimiliki (Purnomo, 2019). Dengan memberikan kemudahan akses pendidikan dan kesehatan pada masyarakat miskin dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga berpengaruh terhadap kenaikan tingkat pendapatan. Selain itu kemudahan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat miskin akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki dan akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya program-program sosialisasi mengenai akses fasilitas pendidikan dan kesehatan agar masyarakat yang minim informasi mengenai hal tersebut dapat mengakses fasilitas yang ada. Sehingga program-program dalam peningkatan kualitas manusia dapat terealisasi dengan merata dan tidak ada ketimpangan antar wilayah.

3. Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan

Hasil perhitungan yang diperoleh dari analisis regresi data panel menunjukkan bahwa pada variabel bantuan sosial yang dipresentasikan oleh jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak terdapat hubungan yang pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Hasil riset yang diberikan

menunjukkan hasil yang serupa dengan riset yang dilakukan oleh Ridha et al., (2021), dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa tidak adanya suatu hubungan yang berpengaruh signifikan dari pelaksanaan program bantuan sosial terhadap pengentasan kemiskinan. Program bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur karena realita yang terjadi di lapangan berdasarkan pengamatan banyak tunjangan yang didapat masyarakat melalui program bantuan sosial tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jika hal tersebut terus terjadi maka tujuan dari adanya program bantuan sosial yaitu meringankan beban masyarakat miskin yang berpendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan tidak dapat terealisasi secara merata. Diperlukan peningkatan literasi keuangan atau disebut *economic literacy* agar keluarga penerima manfaat bantuan sosial dapat memanfaatkan tunjangan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dengan adanya *economic literacy* manusia dapat memahami bahwa sebagai manusia ekonomi harus tetap dapat mencukupi kebutuhan hidup yang bersifat tidak terbatas dengan adanya sumber daya yang terbatas (Aprillia, Mintarti, & Utomo, 2015). Sehingga masyarakat akan cenderung lebih mengutamakan kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder dan tersier serta tidak terjadi pemborosan sehingga kesejahteraan akan meningkat.

Penyebab lain tidak signifikannya pengaruh bantuan sosial terhadap pengentasan kemiskinan adalah tidak akuratnya data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Permasalahan tersebut terjadi karena adanya *inclusion error* yang merupakan warga yang masuk dalam kriteria mampu tetapi terdaftar dalam keluarga penerima manfaat bantuan sosial dan *exclusion error* yang merupakan warga yang masuk dalam kriteria tidak mampu namun tidak terdaftar dalam keluarga penerima manfaat bantuan sosial (Purnomo, 2019). Permasalahan kriteria kelayakan keluarga penerima manfaat yang tidak diatasi dengan benar maka berpengaruh terhadap jumlah anggaran belanja bantuan sosial yang diberikan pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah di bawahnya tidak akan mencapai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Program bantuan sosial yang telah diberlakukan sebelumnya seperti bantuan sosial tunai, program keluarga harapan, bantuan langsung tunai dana desa, dan program bantuan sosial pangan non tunai. Namun, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 menjalankan empat program bantuan sosial baru dengan tujuan sasaran diluar penerima bantuan sosial yang telah ada sebelumnya (Kominfo Jatim, 2021). Empat program bantuan sosial tersebut adalah bantuan PKH Plus, Bantuan santunan kepada korban meninggal dunia akibat adanya pandemi covid-19, bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas, dan bantuan jaring pengaman sosial. Bantuan tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk membantu mengurangi beban yang dirasakan masyarakat yang ada di wilayah Jawa Timur karena terdampak covid-19. Sehingga dari hal tersebut banyak masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan sosial, tetapi akibat dari munculnya pandemi covid-19 terdapat masyarakat baru yang termasuk dalam kriteria untuk mendapatkan bantuan. Hal tersebut tidak memiliki sebuah hubungan yang berpengaruh signifikan terhadap pengentasan permasalahan kemiskinan karena bantuan sosial yang diberikan bertujuan untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat akibat munculnya pandemik covid-19, sehingga fokus utama bantuan sosial yang diberikan bukan dalam pengentasan tingkat kemiskinan. Munculnya covid-19 menimbulkan kerentanan ekonomi bagi masyarakat menengah, sehingga masyarakat yang tergolong dalam kalangan menengah sebelumnya dan tergolong mampu secara ekonomi akibat dari terkena dampak pandemi akhirnya masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial selama pandemi covid-19 terjadi.

CONCLUSION AND SUGGESTION

Conclusion

Berdasarkan pembahasan pada hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan positif dengan tingkat kemiskinan dimana hal tersebut sesuai dengan teori yang ada. Jika tingkat pengangguran menurun masyarakat miskin memiliki kegiatan produktif

- untuk mendapatkan upah atau pendapatan sehingga kesejahteraan akan meningkat dan menurunkan angka kemiskinan.
2. Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan kualitas manusia yang ada di suatu wilayah, sehingga ketika nilai IPM berpengaruh signifikan negatif maka kualitas masyarakat dari segi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan cukup baik dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
 3. Bantuan sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan karena adanya beberapa permasalahan yang terjadi seperti kriteria penerima manfaat yang tidak sesuai serta pemanfaatan tunjangan bantuan sosial yang tidak sesuai tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu bantuan sosial yang diberikan pada tahun 2020 lebih berfokus pada pemberian bantuan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, dimana hal tersebut banyak terdapat dari masyarakat menengah yang mengalami kerentanan ekonomi.

Suggestion

Pengurangan angka kemiskinan perlu menjadi fokus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan ekonomi. Pengurangan angka kemiskinan akan berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu implikasi kebijakan pada penelitian ini berfokus pada kebijakan dan program yang dapat direalisasikan sebagai langkah untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dan pemberian modal usaha untuk masyarakat agar terbentuk lapangan usaha baru dan kegiatan produksi dapat berjalan lancar, sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan akan mengurangi angka kemiskinan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan pemerintah perlu lebih banyak memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai akses fasilitas yang disediakan, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan akan mempengaruhi tingkat IPM sebagai tolak ukur capaian pembangunan manusia. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat pemerintah dapat memberikan kepada lebih banyak masyarakat agar tujuan bantuan sosial untuk mengurangi beban masyarakat yang mengalami kerentanan ekonomi dapat tercapai, selain itu dalam pendataan penerima bantuan sosial harus dilakukan secara bertahap dan rutin sehingga bantuan yang diberikan

tepat sasaran dan tidak salah arah. Bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial perlu dilakukan edukasi mengenai pengelolaan dana bantuan sosial yang didapat agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan tidak digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Penelitian berikutnya disarankan untuk menguji pengaruh lain yang menyebabkan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat melihat dari segala sisi faktor yang menjadi penyebab kemiskinan.

BIBLIOGRAPHY

- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113-123. Retrieved from <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/671/707>
- Aprillia, W., Mintarti, U., & Utomo, S. H. (2015). Pengaruh Latar Belakang Sosial Ekonomi Orang Tua, Pendidikan Ekonomi di Keluarga dan Economic Literacy terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 3(1), 78-84. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/jph>
- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 20-28. Retrieved from <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.563>
- BPS. (2011). Konsep/Penjelasan Teknis. Retrieved November 12, 2021, from Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- BPS. (2018a). Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020. Retrieved December 18, 2021, from Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- BPS. (2018b, January 15). Profil Kemiskinan di Jawa Timur September 2018. Retrieved December 18, 2021, from Badan Pusat Statistik website: <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1052/profil-kemiskinan-di-jawa-timur-september-2018.html>
- BPS. (2020a). Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia? Retrieved November 12, 2021, from Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS. (2020b). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2016-2020. Retrieved November 12, 2021, from Badan Pusat Statistik website: <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/10/1720/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-di-indonesia-ribu-2016-2020.html>

- BPS. (2020c). Penduduk Miskin. Retrieved November 16, 2021, from Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- BPS. (2021). Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen. Retrieved November 12, 2021, from Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>
- Drabek, Z. (2021). Governance of FDI and the East Asian Economic Community. *Asia and the Global Economy*, 1(1), 100001. <https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2021.100001>
- Erlando, A., Haryanto, T., & Rositawati, V. (2020). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 89–105. <https://doi.org/10.23960/jep.v9i2.97>
- Faulana, I., Murniawaty, I., & Rusdarti. (2021). Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan PKH Di Jawa Tengah. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 5(1), 1–13. Retrieved from <https://journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/download/2956/1753>
- Firmani, I., & Aif, M. T. (2021). Pengaruh Globalisasi Ekonomi, IPM, Dan Populasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Tujuh Negara Anggota OKI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1). Retrieved from www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. v. (2020). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 39–53. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32812/31003>
- Habibullah, Sugiyanto, Sitepu, A., Irmayani, Susantyo, B., Mujiyadi, B., & Nainggolan, T. (2017). Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Retrieved from <http://puslit.kemosos.go.id/upload/post/files/4befa42f04ade03804a8c7469d411d5c.pdf>
- Hatta, R., & Khoirudin, R. (2020). Analisis Tingkat Kemiskinan di Propinsi NTT: Pendekatan Dua Panel. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 138–150. <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i2.2004>
- Ibnu Abbas, A. S. M. H., & Farida Rahmawati, S. M. (2020). Technological Changes, Investments, and Unemployment in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 679–691. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7925>
- JDIH. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian BUMN*. Retrieved from

<https://jdih.bumn.go.id/baca/Perpres%20Nomor%2063%20Tahun%202017.pdf>

- Katadata. (2018). Berapa Garis Kemiskinan Penduduk Indonesia? Retrieved November 12, 2021, from databoks.katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/01/berapa-garis-kemiskinan-penduduk-indonesia>
- Kharisma, B., Remi, S. S., Wardhana, A., & Minarso, D. (2020). Modal sosial dan kemiskinan di Jawa Barat *INFORMATIKEL. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 317–338. Retrieved from <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3303>
- Kominfo Jatim. (2021). Kadinsos Jatim: Ada 4 Program Bansos dari Pemprov Jatim | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Retrieved November 16, 2021, from Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur website: <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kadinsos-jatim-ada-4-program-bansos-dari-pemprov-jatim>
- Lindiasari S, P., & Ramadhani, A. W. (2019). Efektivitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non-Parametrik. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 10–34. Retrieved from <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/14227/10742>
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi* (6th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 185–192. Retrieved from <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>
- Purnomo, S. D. (2019). Determinan kemiskinan di provinsi daerah istimewa yogyakarta. *FORUM EKONOMI*, 21(2), 217–225. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3858>
- Ridha, M. R., Sinring, B., & Baharuddin, D. (2021). Pengaruh Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 75–81. Retrieved from <http://www.jurnalpertanianumpar.com/index.php/economos/article/view/782/416>
- Sumarsono, Dr. H., & Novarinda, L. (2016). Potrait of Poverty and Related Categories Human Development Index (HDI) District/City in East Java (2005-2014). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 07(05), 01–08. <https://doi.org/10.9790/5933-0705020108>

Syofya, H. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 177-185. Retrieved from <https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153>

Todaro, M. P., & S. S. C. (2009). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Jakarta: Erlangga.

UNDP. (2017). What are the Sustainable Development Goals? Retrieved November 16, 2021, from United Nations Development Programme website: https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7kvNRZCqcCjwViGS7dU-Eae7PSXKazsoiQdCF5_QMb38vXTfyI9ST4aAqhzEALw_wcB